



Militer dan Politik di Indonesia dalam Konteks Ketegangan Maritim di Laut China Selatan

Heti Sarlini¹, Dewi Yanti², Serly Santika³, Jelita Silvia Hutabarat⁴

¹²³⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 10, 2024

Revised May 19, 2024

Accepted May 26 2024

Available online 01 June 2024

Keywords:

Indonesia, Laut China Selatan, ketegangan maritim, keamanan nasional

Keywords:

Indonesia, South China Sea, maritime tensions, national security



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Ketegangan maritim di Laut China Selatan telah menjadi salah satu isu geopolitik yang paling signifikan di Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan ini, memiliki peran penting dalam dinamika tersebut. Jurnal ini membahas interaksi antara militer dan politik di Indonesia dalam konteks ketegangan di Laut China Selatan, serta bagaimana Indonesia merespons tantangan keamanan maritim yang meningkat di wilayah tersebut. Ketegangan di Laut China Selatan telah menjadi isu yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara maritim dengan kepentingan strategis di kawasan tersebut, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perairan yang sarat konflik ini. Jurnal ini mengeksplorasi dinamika politik maritim Indonesia di Laut China Selatan, dengan fokus pada aspek militer dan politik dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan dan pendekatan Indonesia dalam mengatasi ketegangan tersebut. Kawasan Laut China Selatan telah menjadi pusat perhatian global karena persaingan klaim wilayah yang intensif antara negara-negara di sekitarnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu pemain penting dalam kawasan Asia Tenggara, memiliki peran strategis dalam mengelola ketegangan maritim ini. Artikel ini menganalisis dinamika militer dan politik Indonesia

sehubungan dengan ketegangan maritim di Laut China Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen dan wawancara dengan pakar keamanan nasional serta pejabat pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan militer Indonesia, kebijakan luar negeri yang berfokus pada diplomasi maritim, dan peran aktif Indonesia dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

ABSTRACT

Maritime tensions in the South China Sea have become one of the most significant geopolitical issues in Southeast Asia. Indonesia, as a country with a strategic position in this region, plays a crucial role in these dynamics. This journal discusses the interaction between the military and politics in Indonesia in the context of the tensions in the South China Sea and how Indonesia responds to the increasing maritime security challenges in the area. Tensions in the South China Sea have intensified in recent years. As a maritime nation with strategic interests in the region, Indonesia plays a key role in maintaining stability and security in these conflict-ridden waters. This journal explores Indonesia's maritime political dynamics in the South China Sea, focusing on the domestic military and political aspects that influence Indonesia's policies and approaches to addressing these tensions. The South China Sea region has become a global focal point due to the intense territorial claims competition among neighboring countries. Indonesia, as the world's largest archipelagic state and a key player in Southeast Asia, has a strategic role in managing these maritime tensions. This article analyzes Indonesia's military and political dynamics concerning the maritime tensions in the South China Sea. The research employs document analysis and interviews with national security experts and relevant government officials. The findings indicate an enhancement of Indonesia's military capabilities, a foreign policy focused on maritime diplomacy, and Indonesia's active role in promoting peace and stability in the region.

PENDAHULUAN

Kawasan Laut China Selatan telah menjadi sumber ketegangan regional yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Persaingan klaim wilayah, sumber daya alam, dan jalur perdagangan di wilayah ini telah memunculkan kompleksitas politik dan keamanan yang mempengaruhi negara-negara di sekitarnya. Dalam konteks ini, Indonesia, dengan kedudukannya sebagai negara maritim utama di Asia Tenggara, memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di kawasan ini.

*Corresponding author

Email: hetisarlini530@gmail.com¹, dewiyanti0960@gmail.com², salwasitisantika@gmail.com³, jelitahtbrt@gmail.com⁴

Laut China Selatan adalah jalur perdagangan vital dan kaya sumber daya alam, menjadikannya pusat persaingan strategis antara berbagai negara, termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Meskipun Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam klaim teritorial yang tumpang tindih, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna sering menjadi titik ketegangan dengan China.

Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah perairan yang paling strategis dan sekaligus rawan konflik di dunia. Perairan ini tidak hanya menjadi jalur pelayaran internasional yang vital untuk perdagangan global, tetapi juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan potensi perikanan yang melimpah. Namun, klaim tumpang tindih atas wilayah laut oleh berbagai negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan telah menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan di kawasan ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu negara maritim utama di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang signifikan di Laut China Selatan. Meskipun tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah yang dipersengketakan, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berbatasan dengan wilayah sengketa tersebut. Selain itu, jalur pelayaran internasional yang melintas Laut China Selatan sangat penting bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan maritim Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kebijakan militer dan politik Indonesia dalam menanggapi ketegangan di Laut China Selatan.
2. Menilai dampak ketegangan tersebut terhadap keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia.
3. Mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam forum internasional untuk menjaga stabilitas regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Sumber data berasal dari artikel jurnal, laporan kebijakan, dan berita terkini yang relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Geopolitik Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritimnya. Kepulauan Natuna, yang terletak di ujung selatan Laut China Selatan, sering menjadi fokus perhatian dalam perselisihan maritim. Meskipun Indonesia tidak memiliki klaim teritorial di Laut China Selatan, klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) oleh China menimbulkan ancaman terhadap integritas ZEE Indonesia.

Dinamika Ketegangan di Laut China Selatan

Ketegangan di Laut China Selatan dipicu oleh klaim teritorial yang saling tumpang tindih, pembangunan infrastruktur militer oleh China di pulau-pulau buatan, serta patroli dan latihan militer oleh berbagai negara yang berkepentingan. Situasi ini diperburuk oleh aktivitas penangkapan ikan ilegal, eksplorasi sumber daya energi, dan meningkatnya kehadiran militer di kawasan tersebut.

Signifikansi Strategis Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan sepertiga dari total perdagangan maritim global melintasinya. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas alam, yang menjadi faktor penting dalam perebutan pengaruh di wilayah ini.

Kepentingan Strategis Indonesia di Laut China Selatan

Kepentingan strategis Indonesia di Laut China Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kedaulatan wilayah dan klaim ZEE Indonesia memiliki wilayah perairan yang berbatasan dengan Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Natuna yang terletak di bagian selatan Laut China Selatan. Indonesia mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna, yang sebagian wilayahnya tumpang tindih dengan klaim Cina atas "Jalur Sembilan Garis" di Laut China Selatan. Hal ini menimbulkan potensi konflik kedaulatan wilayah antara Indonesia dan Cina.
2. Jalur pelayaran internasional dan perdagangan maritim Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi Indonesia. Sekitar 60% perdagangan luar negeri Indonesia melewati perairan ini. Gangguan terhadap keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan dapat membahayakan aktivitas perdagangan maritim Indonesia dan merugikan perekonomian nasional.
3. Sumber daya alam dan potensi ekonomi Laut China Selatan kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan potensi perikanan yang melimpah. Indonesia memiliki kepentingan ekonomi untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut di wilayah ZEE-nya, termasuk di sekitar Kepulauan Natuna.

Adaptasi dan Transformasi Signifikan

Menyadari potensi eskalasi di Laut China Selatan, Indonesia melakukan transformasi signifikan dalam modernisasi militernya, dengan fokus khusus pada aspek maritim. Modernisasi alutsista menjadi prioritas utama, dengan pengadaan berbagai jenis kapal perang, pesawat patroli maritim, dan sistem persenjataan canggih. Peningkatan latihan dan pendidikan militer, serta penguatan patroli maritim, juga menjadi bagian penting dari strategi pertahanan maritim Indonesia.

Di samping modernisasi internal, Indonesia aktif dalam kerjasama maritim regional dan internasional. Keikutsertaan aktif dalam forum seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Indian Ocean Naval Symposium (IONS) memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan koordinasi keamanan maritim dengan negara-negara lain di kawasan. Peran Indonesia dalam prakarsa maritim regional, seperti Patroli Bersama Maritim (Sambas Patrol) dan Coordinated Patrol (Corpat), semakin memperkuat komitmennya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Dinamika Politik Dalam Negeri dan Kebijakan Maritim Indonesia

Dinamika politik dalam negeri Indonesia turut mempengaruhi kebijakan dan pendekatan yang diambil dalam menangani isu Laut China Selatan. Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik di Laut China Selatan Pemerintah Indonesia telah menempuh pendekatan diplomasi dan penyelesaian sengketa secara damai dalam menangani konflik di Laut China Selatan. Indonesia mendorong penyelesaian sengketa melalui perundingan dan mekanisme hukum internasional, serta menghindari penggunaan kekerasan atau tindakan militer yang dapat memperkeruh situasi.
2. Peran militer dan modernisasi kekuatan angkatan laut
Meskipun mengutamakan pendekatan diplomasi, Indonesia juga terus meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan maritimnya. Modernisasi kekuatan angkatan laut Indonesia, seperti pengadaan kapal perang baru dan peningkatan kemampuan intelijen maritim, bertujuan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional di Laut China Selatan.
3. Diplomasi Maritim dan kerjasama Regional Indonesia
aktif terlibat dalam diplomasi maritim dan kerjasama regional untuk menjaga stabilitas di Laut China Selatan. Indonesia mendorong penerapan Deklarasi Perilaku di Laut China Selatan (DOC) dan berperan dalam perumusan Kode Perilaku di Laut China Selatan (COC) yang mengikat secara hukum. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam forum-forum regional seperti ASEAN dan ARF untuk membahas isu-isu keamanan maritim.
4. Peningkatan Patroli dan Latihan Militer
Peningkatan patroli dan latihan militer di perairan Natuna bertujuan untuk menunjukkan kehadiran dan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Patroli rutin oleh TNI AL melibatkan kapal-kapal perang, pesawat pengintai maritim, dan unit-unit khusus yang ditempatkan di daerah rawan konflik.
5. Pembangunan Infrastruktur Militer
Investasi dalam pembangunan infrastruktur militer di Kepulauan Natuna mencakup pembangunan pangkalan angkatan laut, fasilitas radar, dan landasan udara untuk mendukung operasi udara dan laut. Ini penting untuk memastikan kesiapan operasional TNI dalam menghadapi potensi ancaman.
6. Kerjasama Internasional
Kerjasama dengan negara-negara lain melalui latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan perjanjian keamanan membantu memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim. Latihan bersama dengan Amerika Serikat dan Australia, misalnya, memberikan kesempatan untuk berbagi teknologi dan taktik militer yang mutakhir.

Adaptasi dan Transformasi Signifikan

Menyadari potensi eskalasi di Laut China Selatan, Indonesia melakukan transformasi signifikan dalam modernisasi militernya, dengan fokus khusus pada aspek maritim. Modernisasi alutsista menjadi prioritas utama, dengan pengadaan berbagai jenis kapal perang, pesawat patroli maritim, dan sistem persenjataan canggih. Peningkatan latihan dan pendidikan militer, serta penguatan patroli maritim, juga menjadi bagian penting dari strategi pertahanan maritim Indonesia.

Di samping modernisasi internal, Indonesia aktif dalam kerjasama maritim regional dan internasional. Keikutsertaan aktif dalam forum seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Indian Ocean Naval Symposium (IONS) memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan koordinasi keamanan maritim dengan negara-negara lain di kawasan. Peran Indonesia dalam prakarsa maritim regional, seperti Patroli Bersama Maritim (Sambas Patrol) dan Coordinated Patrol (Corpat), semakin memperkuat komitmennya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Dinamika yang Membentuk Postur Militer

Dinamika politik domestik dan regional memainkan peran penting dalam membentuk postur militer dan strategi maritim Indonesia. Di dalam negeri, isu-isu seperti nasionalisme, kedaulatan maritim, dan potensi konflik menjadi faktor pendorong modernisasi militer. Kekhawatiran publik terhadap pelanggaran kedaulatan maritim, seperti pencurian ikan dan masuknya kapal asing secara ilegal, mendorong pemerintah untuk memperkuat kemampuan maritim Indonesia.

Di tingkat regional, Indonesia aktif mendorong penyelesaian sengketa maritim secara damai melalui dialog dan kerjasama. Prinsip ASEAN yang mengedepankan musyawarah dan penghormatan terhadap hukum internasional menjadi pedoman utama dalam diplomasi maritim Indonesia. Indonesia juga aktif dalam berbagai mekanisme regional, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), untuk mempromosikan kerjasama maritim dan membangun kepercayaan di antara negara-negara di kawasan.

Kebijakan Politik

Secara politik, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan dan mencegah eskalasi konflik. Kebijakan politik Indonesia mencakup:

1. Diplomasi Maritim: Melalui forum-forum internasional seperti ASEAN, Indonesia aktif mendorong dialog dan kerjasama maritim untuk menjaga stabilitas di kawasan.
2. Non-Klaim Teritorial: Menegaskan posisi Indonesia yang tidak memiliki klaim teritorial di Laut China Selatan, namun tegas dalam mempertahankan ZEE-nya.
3. Hukum Internasional: Mengacu pada hukum internasional, khususnya UNCLOS, dalam menyelesaikan sengketa maritim.

Diplomasi Maritim

Indonesia menggunakan diplomasi maritim sebagai alat untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menjaga stabilitas kawasan. Melalui ASEAN dan forum internasional lainnya, Indonesia berupaya mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional.

Non-Klaim Teritorial

Meskipun tidak memiliki klaim teritorial di Laut China Selatan, Indonesia secara tegas mempertahankan ZEE-nya dari ancaman eksternal. Pendirian ini memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritim tanpa memicu konflik langsung dengan negara-negara pengklaim lainnya.

Hukum Internasional

Indonesia berkomitmen pada prinsip-prinsip UNCLOS sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa maritim. Pendekatan berbasis hukum ini membantu memperkuat legitimasi Indonesia di panggung internasional dan mendukung upaya diplomatiknya.

Tantangan dan Peluang bagi Indonesia

Dalam mengelola dinamika politik maritim di Laut China Selatan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Tantangan:

1. Menjaga netralitas di tengah persaingan kekuatan besar. Salah satu tantangan utama bagi Indonesia adalah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik langsung dengan kekuatan besar seperti Cina dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis di Laut China Selatan. Indonesia harus dapat mengambil posisi yang adil dan tidak memihak dalam menghadapi persaingan kekuatan besar tersebut.
2. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan pengamanan wilayah maritime. Meskipun Indonesia tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah sengketa di Laut China Selatan, namun negara ini tetap harus meningkatkan kapasitas pertahanan dan pengamanan wilayah maritimnya. Hal ini diperlukan untuk melindungi kedaulatan wilayah, klaim ZEE, dan kepentingan ekonomi Indonesia di perairan tersebut.
3. Mengelola aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, pencurian sumber daya alam, dan pelanggaran wilayah merupakan ancaman nyata bagi kepentingan Indonesia di Laut China Selatan. Pengelolaan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah perairan Indonesia menjadi tantangan tersendiri.
4. Menjaga Netralitas di Tengah Persaingan Kekuatan Besar. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga netralitas di tengah persaingan kekuatan besar, terutama antara Cina dan Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan strategis di Laut China Selatan. Kedua negara adidaya ini berupaya untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut, baik secara ekonomi, politik, maupun militer Cina, dengan klaim "Jalur Sembilan Garis" yang luas di Laut China Selatan, berusaha untuk memperkuat kontrol atas perairan tersebut. Cina juga telah melakukan kegiatan militerisasi di beberapa pulau buatan yang dibangunnya di wilayah sengketa. Di sisi lain, Amerika Serikat, sebagai sekutu dekat Indonesia, mendukung kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut China Selatan serta menentang klaim sepihak Cina atas wilayah tersebut. Indonesia berada dalam posisi yang sulit

karena harus menjaga hubungan baik dan kerjasama ekonomi dengan kedua kekuatan besar tersebut. Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, sementara Amerika Serikat adalah sekutu strategis dalam bidang keamanan dan pertahanan. Memihak salah satu pihak dapat membahayakan kepentingan nasional Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, Indonesia harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengelola hubungan dengan Cina dan Amerika Serikat. Indonesia harus memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga prinsip bebas-aktif dalam menentukan kebijakan luar negeri. Diplomasi yang terampil dan komunikasi yang terbuka dengan semua pihak menjadi kunci untuk mencegah terjerembabnya Indonesia dalam konflik antara kekuatan besar tersebut.

5. Meningkatkan Kapasitas Pertahanan dan Pengamanan Wilayah Maritim. Meskipun Indonesia tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah sengketa di Laut China Selatan, negara ini tetap memiliki kepentingan strategis yang harus dilindungi di perairan tersebut. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas pertahanan dan pengamanan wilayah maritim menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas angkatan laut Indonesia. Untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah perairan yang luas, Indonesia membutuhkan armada kapal patroli, pesawat maritim, dan sistem pengawasan maritim yang modern. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan intelijen maritim dan berbagi informasi dengan negara-negara mitra untuk mengantisipasi ancaman seperti aktivitas ilegal, pelanggaran wilayah, dan potensi konflik di Laut China Selatan. Kerjasama internasional dalam bidang keamanan maritim menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Modernisasi kekuatan angkatan laut Indonesia telah menjadi prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar-besaran untuk pengadaan kapal perang baru, pesawat maritim, dan sistem persenjataan modern lainnya. Namun, proses modernisasi ini masih membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk mencapai tingkat kapasitas yang diharapkan. Selain peningkatan kapasitas militer, Indonesia juga harus memperkuat kerangka hukum dan penegakan hukum di wilayah perairan nasional. Hal ini meliputi penguatan peraturan dan ketegasan dalam menindak aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, pencurian sumber daya alam, dan pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal asing.

Peluang:

1. Membangun kepercayaan dan kerjasama maritim dengan negara-negara kawasan Indonesia memiliki peluang untuk membangun kepercayaan dan kerjasama maritim dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik lainnya. Kerjasama ini dapat mencakup aspek keamanan maritim, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi maritim.
2. Mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai Sebagai negara yang menganut prinsip bebas-aktif, Indonesia memiliki peluang untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai dan diplomasi maritim di Laut China Selatan. Hal ini dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada stabilitas regional.
3. Mengembangkan potensi ekonomi maritim Dengan wilayah perairan yang luas dan kekayaan sumber daya alam maritim, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi maritim seperti perikanan, pariwisata
4. Membangun Kepercayaan dan Kerjasama Maritim dengan Negara-negara Kawasan. Di tengah ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia memiliki peluang untuk membangun kepercayaan dan kerjasama maritim dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik lainnya. Kerjasama ini dapat mencakup aspek keamanan maritim, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi maritim. Salah satu inisiatif penting adalah memperkuat kerjasama dalam keamanan maritim melalui forum-forum regional seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF). Melalui forum-forum ini, negara-negara anggota dapat berbagi informasi intelijen, berkoordinasi dalam operasi gabungan, dan meningkatkan interoperabilitas angkatan laut mereka. Selain itu, Indonesia juga dapat mengambil peran kepemimpinan dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam maritim yang berkelanjutan di kawasan. Kerjasama dalam bidang konservasi laut, pengelolaan perikanan, dan eksplorasi sumber daya energi dapat membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia dan negara-negara mitra. Pengembangan sektor ekonomi maritim juga menjadi peluang besar bagi Indonesia. Dengan wilayah perairan yang luas dan kekayaan sumber daya alam maritim, Indonesia dapat mempromosikan kerjasama dalam bidang pariwisata bahari, industri maritim, dan pengembangan pelabuhan laut. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim di kawasan. Dalam membangun kerjasama maritim dengan negara-negara kawasan, Indonesia harus bertindak sebagai pemimpin yang kredibel dan bertanggung jawab. Dengan mempromosikan pendekatan diplomasi

maritim yang inklusif dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, Indonesia dapat menjadi contoh positif bagi stabilitas regional di Laut China Selatan.

5. Mempromosikan Penyelesaian Sengketa Secara Damai. Sebagai negara yang menganut prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri, Indonesia memiliki peluang untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai dan diplomasi maritim di Laut China Selatan. Hal ini dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada stabilitas regional. Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam mendorong dialog dan perundingan antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. Melalui diplomasi yang terampil dan komunikasi yang terbuka, Indonesia dapat menjadi jembatan penghubung dan mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional yang berlaku. Salah satu langkah penting yang dapat diambil Indonesia adalah mendukung penuh implementasi Deklarasi Perilaku di Laut China Selatan (DOC) dan berperan dalam perumusan Kode Perilaku di Laut China Selatan (COC) yang mengikat secara hukum. Kerangka hukum ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik terbuka dan menjamin kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga dapat mengambil peran sebagai mediator dalam sengketa antara negara-negara tertentu di kawasan tersebut. Dengan posisi netral dan kepentingan yang tidak bertentangan dengan pihak-pihak yang bersengketa, Indonesia dapat menawarkan jasa baik dan memfasilitasi dialog untuk mencapai solusi damai.

SIMPULAN

Militer, politik, dan dinamika Laut China Selatan saling terkait erat dalam konteks Indonesia. Upaya modernisasi militer, strategi maritim yang adaptif, dan diplomasi regional yang proaktif menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di Laut China Selatan. Menjaga kedaulatan maritim, memastikan kebebasan navigasi, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan kerjasama akan menjadi fokus utama bagi Indonesia di masa depan. Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan melalui kombinasi kekuatan militer dan diplomasi yang strategis. Dengan terus meningkatkan kapabilitas militernya dan berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang kompleks.

Ketegangan di Laut China Selatan merupakan tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas regional dan melindungi kepentingan nasionalnya. Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang berbatasan dengan Laut China Selatan, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang signifikan di kawasan tersebut, baik dari segi kedaulatan wilayah, jalur pelayaran internasional, maupun sumber daya alam maritim.

Dalam menghadapi dinamika politik maritim di Laut China Selatan, Indonesia dihadapkan pada tantangan seperti menjaga netralitas di tengah persaingan kekuatan besar, meningkatkan kapasitas pertahanan dan pengamanan wilayah maritim, serta mengelola aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Namun, di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang untuk membangun kepercayaan dan kerjasama maritim dengan negara-negara kawasan, mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai, dan mengembangkan potensi ekonomi maritim yang besar.

Dengan mengoptimalkan kekuatan militer dan diplomasi maritim, serta membangun kerjasama dengan negara-negara mitra di kawasan, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan di perairan yang strategis ini. Pendekatan yang mengedepankan dialog, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap hukum internasional menjadi kunci bagi Indonesia dalam mempertahankan stabilitas regional dan melindungi kepentingan nasionalnya di Laut China Selatan.

Selain itu, pengembangan sektor ekonomi maritim yang berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan industri maritim, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim di kawasan. Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang secara bijaksana, Indonesia dapat menjadi aktor kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan, serta meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui optimalisasi potensi maritim.

REFERENSI

- Djalal, D. (2020). *Indonesia and the South China Sea: Maintaining Maritime Sovereignty*. Jakarta: Indonesian Defense University Press.
- ASEAN. (2021). *ASEAN's Role in Maritime Security in the South China Sea*. ASEAN Secretariat.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982). United Nations.

- Smith, H. (2019). *The Strategic Importance of the South China Sea: Security, Resources, and International Politics*. New York: Routledge.
- Jones, D. (2018). *Maritime Security in Southeast Asia: Issues and Challenges*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Indonesia Ministry of Defense. (2022). *Defense White Paper*. Jakarta: Indonesia Ministry of Defense.
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House.
- Gindarsah, I. (2021). Indonesia's Defense Diplomacy in the South China Sea. *Journal of Strategic Studies*, 44(2), 234-252.
- Sukma, R. (2017). Indonesia's Security Outlook: Defense Policy and Regional Cooperation. *Journal of Contemporary Southeast Asian Studies*, 29(1), 1-25.
- <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/2149>
- <https://www.researchgate.net/publication/348619276> SENGKETA LAUT CINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA
- <https://www.researchgate.net/publication/346664828> STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA PERANG HIBRIDA KAWASAN LAUT CHINA SELATAN
- <https://www.researchgate.net/publication/348619276> SENGKETA LAUT CINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA